

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Kajian hukum lingkungan keperdataan

- Ganti Rugi
  - Tindakan tertentu
  - Pembayaran uang paksa
-  Konsep tanggungjawab dan beban pembuktian,  
Kewenangan menggugat

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Jenis tanggung gugat dan beban pembuktian

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*)  $\implies$  Ps. 87 (1) UUPPLH-2009
2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dg beban pembuktian terbalik
3. Tanggung gugat mutlak/seketika (*strict liability*)  $\implies$  Pasal 88 UUPPLH

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Unsur-Unsur PMH

(Pasal 87 ayat 1 UUPPLH-2009 jo 1365 BW)

1. Perbuatan harus melawan hukum
2. Pelaku harus bersalah
3. Ada kerugian
4. Ada hub. Kausal antara perbuatan dg kesalahan

### **Catatan:**

- Sulit pembuktian unsur-unsur tsb, terutama unsur kesalahan dan hubungan kausal
- Ps. 87 (1) UUPPLH-2009 tidak menganut beban pembuktian terbalik.

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Strict Liability

- Dasar Hukum:
  - ✓ Pasal 88 UUPPLH-2009
  - ✓ Kepres 18/1978 tentang CLC-1969
  - ✓ UU No. 5/1983 tentang ZEEI, Ps. 11 dan 12.
- Penerapannya untuk kegiatan resiko tinggi, misalnya B3
- Pengecualian:
  - ✓ Ada bencana alam/peperangan
  - ✓ Keadaan terpaksa,
  - ✓ Tindakan pihak ketiga

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Gugatan Kelompok (*Class Action*)

- Pengertian  
Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yg jumlahnya banyak, yg memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.
- Di USA dikenal dengan “**Actio Popularis**”
- Dasar Hukum di Indonesia:
  - ✓ Pasal 91 UUPPLH-2009
  - ✓ Peraturan MA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Gugatan Kelompok (*Class Action*)

- Persyaratan Gugatan Kelompok:
  - ✓ Jumlah anggota kelompok banyak
  - ✓ Terdapat kesamaan fakta/peristiwa, kesamaan dasar hukum, kesamaan jenis tuntutan
  - ✓ Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok
- Persyaratan Surat Gugat
  - ✓ Memenuhi persyaratan formal Hk. Acara Perdata
  - ✓ Memenuhi persyaratan Ps. 3 Peraturan MA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugat Perwakilan Kelompok

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## GUGATAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Perkembangan baru dalam UUPPLH-2009 bahwa Pemerintah dan Pemda berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap saha/kegiatan yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan (pasal 90 UUPPLH-2009)

# Hukum Lingkungan Keperdataan

## Kewenangan Gugat Organisasi Lingkungan

- Negara Maju (Misalnya AS, Belanda) mengakui hak gugat Organisasi LH
- Indonesia ?
  - ✓ Diakui dalam Ps. 92 (1) UUPPLH-2009
  - ✓ Tidak semua Organisasi LH bisa menggugat (Ps. 92 ayat 3 UUPPLH-2009)
  - ✓ Apa yang dapat digugat ? Hanya “tindakan tertentu” dan tanpa disertai ganti rugi (kecuali biaya atau pengeluaran riil) (Ps. 92 ayat 2 UUPPLH-2009)